ANALISIS PEMBINAAN KEPADA NARAPIDANA ANAK KASUS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK

¹Devin Christiyanto Ku, ²Mitro Subroto

¹Politeknik Ilmu Perasyarakatan, ²Politeknik Ilmu Perasyarakatan,
Email: devinchku@gmail.com, subrotomitro07@gmail.com

Abstract

Drug abuse is not only done and occurs to adults, but also to children. The position of children who are considered not legally competent and their position is still unstable, making children an easy target for dealers to be able to market their illicit goods. The Child Special Guidance Institution is obliged to raise, train, train, and do other things in accordance with legal requirements. The research method uses normative legal research, namely research conducted by focusing on positive legal norms in the form of laws and regulations governing the treatment given to death row inmates based on the correctional system.

This is because children who are convicted of committing a crime are entitled to guidance, guidance, supervision, support, education and training, as well as other rights according to the provisions of the law. Family and environmental factors are the main factors for a child to abuse narcotics. In addition, there are also internal factors such as an identity crisis and weak self-control, which can also easily influence a child to do things beyond his control. The government, society, families and parents are obliged and responsible to carry out child protection, and protect children from the dangers of narcotics.

Keywords: *Child Prisoners; Child Special Guidance Institutions; Narcotics*

Abstrak

Penyalahgunaan narkoba bukan hanya dilakukan dan terjadi kepada orang dewasa, tetapi juga terhadap anak-anak. Posisi anak yang dianggap belum cakap hukum dan posisi mereka yang masih labil, menjadikan anak sebagai sasaran empuk bagi para bandar untuk dapat memasarkan barang haramnya tersebut. Metode Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada norma hukum positif dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlakuan yang diberikan kepada terpidana mati berdasarkan sistem pemasyarakatan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak berkewajiban untuk membesarkan, melatih, melatih, dan melakukan lainnya sesuai dengan persyaratan hukum. Hal ini karena anak yang dihukum karena melakukan tindak pidana berhak atas pembinaan, bimbingan, pengawasan, dukungan, pendidikan dan pelatihan, serta hak-hak lainnya menurut ketentuan undang-undang. Faktor keluarga dan lingkungan menjadi faktor utama seorang anak melakukan penyalahgunaan narkoba. Selain itu adapula faktor internal seperti krisis identitas dan kontrol diri yang lemah, yang juga dapat dengan mudahnya mempengaruhi seorang anak melakukan hal diluar kendalinya. Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan anak, dan melindungi anak dari bahaya narkoba.

Kata Kunci: *Lembaga Pembinaan Khusus Anak; Narapidana Anak; Narkoba*

Open Access at: <http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peran strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa. Anak-anak sebagai kekuatan potensial dan untuk memajukan kehidupan yang berkelanjutan, perlu untuk memberikan mereka bimbingan terus menerus, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial, dan perlindungan dari segala kemungkinan yang dapat membahayakan anak di masa depan. Setiap pelecehan dan kekerasan terhadap anak yang terjadi saat ini sama dengan mengurangi kemungkinan keamanan kehidupan bangsa di masa depan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menekankan prinsip rehabilitasi bagi pengguna narkotika, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak anak yang dipidana penjara karena penyalahgunaan zat. Bahkan jika anak-anak menjadi pedagang dan pengguna, mereka akan segera dituntut. Barang-barang terlarang dari distributor dan yang dimiliki pengguna harus dipelajari terlebih dahulu, karena anak-anak ini sangat mungkin dimanfaatkan oleh orang dewasa.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan anak, namun melindungi anak dari bahaya narkotika masih jauh dari yang diharapkan. Mengingat perkembangan dan pemulihan spiritual anak pengguna napza yang pada akhirnya akan kembali ke masyarakat, maka anak pengguna napza memerlukan pembinaan dan penanganan khusus yang menitikberatkan pada penyembuhan jasmani dan rohani anak pengguna napza.

LPKA berkewajiban untuk membesarkan, melatih, melatih, dan melakukan lainnya sesuai dengan persyaratan hukum. Hal ini karena anak yang dihukum karena melakukan tindak pidana berhak atas pembinaan, bimbingan, pengawasan, dukungan, pendidikan dan pelatihan, serta hak-hak lainnya menurut ketentuan undang-undang (M. Nasir Djamil, 2013).

METODOLOGI

Pada penelitian kali ini peneliti akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada norma hukum positif dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlakuan yang diberikan kepada terpidana mati berdasarkan sistem pemasyarakatan. Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah dalam bentuk data sekunder sebagai bagian dari data utama, dan data primer sebagai data penunjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

NARAPIDANA ANAK

Pengertian Anak Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kedudukan anak dalam lingkup masyarakat memposisikan anak sebagai kelompok sosial yang berstatus lebih rendah dari masyarakat lainnya terutama orang dewasa 31 yang tentu lebih tua dari mereka. Jika dilihat dari segi ekonominya, anak merupakan golongan yang belum produktif. Usia anak-anak adalah masanya mereka untuk bermain maupun belajar, bukan untuk bekerja apalagi dengan cara eksploitasi.

Perilaku kenakalan anak./remaja bisa disebabkan oleh faktor dari dirinya sendiri (internal) maupun faktor dari luar (eksternal).

Faktor internal antara lain :

1. Krisis identitas: Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua.
2. Kontrol diri yang lemah: Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku 'nakal'. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya.

Faktor eksternal antara lain :

1. Keluarga dan Perceraian orangtua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun, seperti terlalu memanjakan anak, memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja.
2. Teman sebaya yang kurang baik
3. Komunitas/lingkungan tempat tinggal yang kurang baik

Dalam perspektif Konvensi Hak Anak / KHA (Convention The Rights of The Children/ CRC, anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (children in need of special protection/ CNSP). UNICEF menyebut anak dalam kelompok ini sebagai children in especially difficult circumstances (CDEC), karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar

lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus, membutuhkan perlindungan dan keamanan diri.

Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk menjalani masa pidana sekaligus melakukan pembinaan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut dengan Anak (dengan huruf Kapital) adalah Anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

Berdasarkan pasal 1 Nomor 1 PP Nomor 31 Tahun 1999, pembinaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan fisik dan mental narapidana dan siswa lembaga pemasyarakatan. Pembinaan narapidana adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang dihubungkan bersama untuk mencapai suatu tujuan (Endang Sumiarni, 2003).

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) : tentang Anak Didik Pemasyarakatan dibina di LAPAS, Pembinaan oleh RAPAS dilakukan terhadap anak pidana, Anak Negara, peran orangtua atau badan sosial, orang tua atau wali yang diberi peran melakukan pembimbingan (C.I. Harsono Hs, 1995) Sedikitnya ada empat belas komponen yaitu : falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, klasifikasi, pendekatan klasifikasi, perlakuan terhadap narapidana, orientasi pembinaan, sifat pembinaan, remisi, bentuk bangunan, narapidana, keluarga narapidana dan pembina/pemerintah. Pembinaan merupakan (Samuel Purba, 2003), suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sistematis terencana dan teratur untuk meningkatkan, membimbing, mengarahkan, mengembangkan dan mengawasi guna mencapai tujuan yang telah disepakati. Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas (UU No.12 Tahun 1995): a. pengayoman; b. persamaan perlakuan dan pelayanan; c. pendidikan; d. pembimbingan; e. penghormatan harkat dan martabat manusia; f. f.kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan. Pemasyarakatan secara tegas mengatakan bahwa tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan yang dibagi dalam beberapa hal yaitu narapidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana, narapidana menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya, mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang pidana bagi anak yang terdapat dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 90. Jika diperinci, ketentuan dari pidana ini ditinjau dari segi perumusan sanksi pidana menggunakan jenis-jenis perumusan kumulatif dan kumulatif alternative, sedangkan dari segi lamanya sanksi pidana maksimum (strafmaat) menggunakan sistem pidana maksimum dan sistem batas minimum / maksimum lamanya ancaman pidana.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata untuk memberikan suatu balas dendam bagi pelaku tindak pidana, tapi juga harus memperhatikan mengenai pengayoman dan pemberian bimbingan baik kepada pelaku maupun masyarakat itu sendiri. Dengan semakin berkembangnya kejahatan yang ada, sekarang tidak hanya orang dewasa saja yang terjebak dalam pelanggaran norma, terutama norma hukum. Tapi juga anak-anak yang semakin lama dapat terjerumus ke arah tindak pidana, seperti narkoba, pemerasan, pencurian dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak mengatur secara langsung mengenai penyalahgunaan narkotika terhadap anak.

Apabila adanya kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak, maka hal itu merupakan anak nakal dan ketentuan hukum yang dipergunakan adalah undang-undang pengadilan anak. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur ketentuan pidana formil namun juga mengatur ketentuan pidana materiil terhadap anak yang terlibat dalam masalah hukum, khususnya dalam hukum pidana

Penyalahgunaan NARKOTIKA

Kata narkotika (narcotic) berasal dari bahasa Yunani yakni "narke" yang berarti terbius atau tidak merasakan apa-apa. Secara umum narkotika dapat didefinisikan sebagai bahan atau zat yang dapat berfungsi sebagai obat atau yang dapat mempengaruhi kesadaran, yang bila disalahgunakan dapat merusak fisik (seperti ketagihan) dan mental (hilangnya kesadaran, tingkah laku, dorongan/ keinginan) si pemakai. Berikut beberapa definisi mengenai narkotika (Meylani Putri Utami, 2020).

Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Undang undang narkotika dan psikotropika).

Penyalahgunaan narkotika sendiri adalah ketika ada pihak yang berusaha memproduksi, menggunakan, atau bahkan memperdagangkan narkotika bukan untuk keperluan kesehatan maupun untuk ilmu pengetahuan, yang tentunya juga melanggar hukum yang ada di Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tentang Narkotika, Bagi orang

yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum disebut sebagai penyalahguna. Narkotika dapat digolongkan dari bahan pembuatnya. Berdasarkan bahan pembuatnya, narkotika digolongkan sebagai berikut :

1) Narkotika Alami

Narkotika alami adalah zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu. Contoh narkotika alami adalah ganja, hasis, opium dan daun koka.

2) Narkotika Semi Sintesis Narkotika semi sintesis adalah narkotika alami yang diambil zat adiktifnya

intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk dunia kedokteran. Contoh narkotika semi sintesis adalah morfin, kodein, heroin dan kokain.

3. Narkotika Sintesis Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkotika (sebagai substitusi). Contoh narkotika sintesis adalah petidin, methaden dan nal trexon

Berikut adalah jenis-jenis narkotika disertai dengan karakteristik masing-masing menurut Moh. Taufik Makarao, diantaranya yaitu :

1) Candu atau disebut juga dengan opium

Nama lain dari candu / opium sendiri adalah madat. Madat ini berasal dari tumbuh tumbuhan yang dinamakan papaversomniferum. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya. Narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis depressants yang mempunyai pengaruh hypnotics dan tranquilizers. Depressants yaitu merangsang sistem syaraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat.

2) Morphine Morphine adalah zat utama narkotika yang terdapat pada candu mentah (salah satu jenis candu dalam opium).

Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relative cepat, dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.

3) Heroin

Berasal dari papaversomniferum, seperti telah disinggung diatas bahwa tanaman ini juga menghasilkan codeine, morphine dan opium. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisamati seketika.

4) Cocain

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *everythroxylon coca*, untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun Coca, lalu keringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia.

5) Ganja

Berasal dari bunga-bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari damar tumbuhan *cannabis sativa*. Efek dari hashis lebih kuat daripada ganja.

6) Narkotika sejenis atau buatan

Narkotika ini adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Dari uraian jenis-jenis narkotika diatas, maka dapat diketahui bahwa narkotika dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok:

a) Golongan narkotika (Golongan I) : seperti opium, morphine, heroine dan lain-lain.

b) Golongan psikotropika (Golongan II) : seperti ganja, ecstasy, shabu-shabu, hashis dan lain-lain.

c) Golongan Zat adiktif lain (Golongan III) : yaitu minuman yang mengandung alkohol seperti beer, wine, whisky, vodka dan lain-lain.

Kejahatan narkotika telah mendapat banyak korban. Korban narkotika tidak hanya berasal dari orang dewasa saja, tetapi juga sudah menggiring anak dibawah umur sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur disebabkan oleh pemikiran yang masih sangat labil dan sangat mudah untuk dipengaruhi. Efek dari penyalahgunaan narkotika dapat mempengaruhi susunan syaraf, mengakibatkan ketagihan, dan ketergantungan. Yang dimaksud dengan ketagihan adalah kecanduan. Pencandu pada dasarnya adalah korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yang merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan segala bidang (Taufik Makaro, 2003).

Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, adalah sebagai berikut (Rena Yulia, 2009) :

1. Unrelated Victims

Adalah mereka atau seseorang yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang adanya potensi atau potensial.

2. Propocative Victims

Adalah mereka atau seseorang yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.

3. Participing Victims

Adalah mereka atau seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya untuk menjadi korban.

4. Biologillogy Weak Victims

Adalah mereka atau seseorang yang disebabkan mempunyai kelemahan fisik sehingga menyebabkan ia menjadi korban.

5. Socially Weak Victims

Adalah mereka atau seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial yang lemah yang menyebabkan seseorang tersebut menjadi korban.

6. Self Victimizing Victims Adalah mereka atau seseorang yang menjadi korban kejahatan yang diakibatkan atau dilakukan oleh orang itu sendiri.

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK

Lembaga Pemasyarakatan Anak (LP Anak) menurut pasal 60 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaga Pemasyarakatan Anak (LP Anak) adalah tempat pembinaan dan pendidikan bagi anak pidana, anak negara dan anak sipil.¹² Dilihat dari pasal 60 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 jo . Pasal 18 Undangundang Nomor 12 Tahun 1995, maka anak pelaku tindak pidana harus ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa. Pelaksanaan pemisahan pembinaan ini sebagai upaya untuk menghindari terjadinya penularan kejahatan dari orang dewasa terhadap anak dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (Samuel Purba, 2013).

Secara garis besar penjara anak-anak sebagai wadah untuk menampung dan memperbaiki anak-anak nakal dibuka pada tahun 1928 dan berturut-turut diurus oleh :

1. Tahun 1928 diurus oleh Pemerintah Belanda
2. Tahun 1934 diserahkan kepada Badan Swasta Pra Juvenile
3. Tahun 1942 diurus oleh Pemerintah dai Nippon
4. Tahun 1950 dikembalikan kepada Badan Swasta Pra Yuwana
5. Tahun 1961 diurus oleh Pemerintah Republik Indonesia

Program rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Anak meliputi lima program pembinaan yang diberikan selama narapidana anak menjalani masa hukumannya, yaitu meliputi program : (1) Pembinaan kesadaran beragama (2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara (3) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) (4) Pembinaan kesadaran hukum (5) Pembinaan menginteraksikan diri dengan masyarakat.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan jumlah penyebarannya di Indonesia saat ini terbatas pada satu LPKA untuk tiap-tiap provinsi. Meskipun pada tiap provinsi di Indonesia setidaknya memiliki satu LPKA, masih banyak anak yang dijatuhi hukuman pidana (anak pidana) menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara bersama dengan narapidana dewasa. Melalui Sistem Database Pemasyarakatan per Oktober 2020 tercatat sebanyak 1322 Anak Pidana di Indonesia (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan)

Data KPAI Setiap tahun ada 6.000 anak dengan 3.800 anak berakhir di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) anak. Sisanya ada di Lapas orang dewasa, di tahanan Kepolisian, dan tempat-tempat lain yang tidak layak untuk anak. Hal ini diakibatkan banyaknya putusan pidana terhadap terpidana anak bermuara kepada putusan pidana penjara. Fakta ini semakin diperparah lagi dengan jumlah Lapas anak di Indonesia yang hanya 17 unit dari 33 provinsi (jumlah kabupaten dan kota di Indonesia kurang lebih 500 kab/kota), dan dari 17 Lapas Anak di Indonesia hanya 8 (delapan) unit Lapas Anak yang berfungsi khusus untuk menangani Anak atau yang isinya murni anak. Sedangkan 9 (sembilan) Lapas khusus anak lainnya, selain menampung anak juga difungsikan untuk menampung tahanan narapidana dewasa.

Lapas dapat mengakibatkan anak semakin rentan untuk mengalami kecemasan, perasaan tertekan, ketakutan, dan gangguan psikologis lainnya. Sebagian besar LP Anak di seluruh Indonesia bercampur dengan penghuni dewasa hal ini memberikan tekanan tersendiri bagi anak. Selain itu, kurangnya kesempatan anak untuk mengekspresikan dirinya di dalam LP membuat beban psikologis tersendiri bagi anak. Salah satu gejala psikologis yang sangat mungkin muncul selama menjalani masa tahanan adalah perasaan cemas. Jika orang dewasa saja merasakan kecemasan, apalagi anak-anak yang masih memiliki kondisi psikologis yang labil. Kecemasan bukan hal yang mudah dikenali dan sering disebut sebagai ketidaknyamanan. Ketika seseorang merasa tidak nyaman, maka akan berdampak pula pada kondisi fisik, emosional, mental, dan spiritualnya. Perasaan cemas menyebabkan seorang anak menjadi gelisah, sehingga memunculkan perasaan negatif, dapat juga mengakibatkan mudah marah, ragu, panik, dan terteror. Lebih jauh lagi, secara mental seorang anak bisa memiliki pemikiran akan mati, dan merasa terasingkan.

Anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini narapidana anak memiliki serangkaian hak-hak yang merupakan hak asasi manusia yang harus diberikan kepadanya, dalam hal pemenuhannya baik dalam bentuk perlakuan secara langsung maupun ketersediaan fasilitas-fasilitas (Abdul Muhammad Sahid, 2017)

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹ Pemenuhan hak anak yang merata tanpa terkecuali bagi anak yang berhadapan dengan hukum haruslah menjadi prioritas utama dalam pembinaan narapidana anak. Oleh sebab itu, kondisi yang mengharuskan anak yang berkonflik dengan hukum ditempatkan di fasilitas narapidana dewasa harus disikapi secara serius untuk menjamin pemenuhan hak anak selama menjalani pembinaan. Paparan data dan uraian diatas menunjukkan bahwa perlu adanya kajian terhadap pemenuhan hak anak yang ditempatkan di lembaga pembinaan yang bukan khusus anak. Tujuannya adalah untuk mengetahui gambaran pemenuhan hak narapidana anak yang ditempatkan di lembaga pembinaan yang bukan khusus anak, secara khusus hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk berpartisipasi, dengan harapan kajian ini dapat menjadi sumber informasi untuk mewujudkan segala kepentingan yang terbaik bagi anak.

Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Heriyanto, 2018). Kemudian, dalam Konvensi tentang Hak Anak Tahun 1989 disebutkan hak-hak anak yang harus dipenuhi yakni: (1) hak untuk bertahan hidup dan berkembang: berupa hak untuk mendapatkan makanan, minuman dan tempat tinggal, (2) hak untuk mendapatkan perlindungan: berupa hak untuk terhindar dari kekerasan, dan (3) hak untuk berpartisipasi: berupa hak untuk ikut serta dalam kegiatan tertentu dan menyalurkan potensi yang dimiliki anak.

Penahanan terhadap anak berkonflik hukum dilaksanakan di tempat khusus untuk anak yakni Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) apabila belum terdapat LPAS pada suatu daerah tertentu. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat lembaga-lembaga antara lain yang menangani anak berkonflik hukum. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Ketiga lembaga tersebut memiliki perbedaan pengertian, yaitu: 1. Lembaga Pembinaan khusus anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. 2. Lembaga Penempatan anak Sementara (LPAS) adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan

berlangsung. Lembaga Penempatan Anak Sementara merupakan penahanan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak. Tempat penahanan anak, harus terpisah dari tempat penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi (Pasal 33 ayat 4 dan ayat 5 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012). Perbedaan lembaga anak berkonflik hukum di Indonesia dilatar belakangi oleh pertimbangan psikologis, untuk menghindari akibat negatif dari anak yang ditahan dan bel

um tentu terbukti melakukan kenakalan, bergaul dengan narapidana anak. Hal tersebut dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman-pengalaman para narapidana anak yang telah terbukti tindak kejahatannya kepada anak yang berstatus tahanan (belum terdakwa), dan mempengaruhi perkembangan mentalnya (Suartha, 2013). Menilik dari banyak penelitian yang sudah dilakukan Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai pengakomodasi fasilitas LPKA dan LPAS

KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian penjelasan artikel ini, maka dapat disimpulkan bahwa seorang anak yang melakukan kejahatan itu didasarkan atas dua hal, yaitu, pertama, karena adanya faktor eksternal (faktor keluarga dan faktor lingkungan); kedua, faktor Internal (krisis identitas dan Kontrol diri yang lemah) Keduanya mempengaruhi seorang anak dalam melakukan kejahatan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan jumlah penyebarannya di Indonesia saat ini terbatas pada satu LPKA untuk tiap-tiap provinsi. Lapas dapat mengakibatkan anak semakin rentan untuk mengalami kecemasan, perasaan tertekan, ketakutan, dan gangguan psikologis lainnya. Sebagian besar LP Anak di seluruh Indonesia bercampur dengan penghuni dewasa hal ini memberikan tekanan tersendiri bagi anak. Namun, Anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini narapidana anak memiliki serangkaian hak-hak yang merupakan hak asasi manusia yang harus diberikan kepadanya, dalam hal pemenuhannya baik dalam bentuk perlakuan secara langsung maupun ketersediaan fasilitas-fasilitas. Untuk itu pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan anak, dan melindungi anak dari bahaya narkoba.

REFERENSI

- C.I. Harsono Hs. 1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Jakarta: Djambatan.
- Djamil, M. Nasir. 2013. Anak Bukan Untuk di Hukum, Jakarta : Sinar Grafika
- Endang, Sumiarni. 2003, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Pidana, ANDI Offset, Yogyakarta.
- Meylani Putri Utami, Tinjauan yuridis terhadap penyalahgunaan narkoba, (Jurnal fakultas hukum universitas hasanuddin Makassar sulsel 2016) akses tgl 20 maret 2020
- Purba, Samuel. dkk, 2013. Program Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Rangka Implementasi Hak Mengembangkan Diri di Provinsi Sulawesi Selatan, Jakarta, Arya Jaya Utama
- Yulia, Rena. 2009. Victimologi, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Perkapolri Nomor 12 Tahun 2012. <<http://acarapidana.bphn.go.id/cgi-sys/suspendedpage.cgi>> diakses pada 31 Agustus 2021.
- UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pasal 5
- Republik Indonesia, Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002
- Persatuan Bangsa-Bangsa, Convention on The Right of the Child 1989, 1989
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, "Sistem Database Pemasyarakatan," 2020, <http://smlap.ditjenpas.go.id>.
- Abdul Muhammad Sahid, "Pemenuhan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum NonDiversi dalam Pemeriksaan di Pengadilan" (Universitas Islam Indonesia, 2017), <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/11854>.
- Heriyanto, "Thematic Analysis Sebagai Metode Menganalisa Data Untuk Penelitian Kualitatif," ANUVA 2, no. 3 (2018): 324.